

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2019 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah Tahun 2019 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan sebagai berikut.

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 2,42%.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,29%.
3. Gini Ratio sebesar 0,32%.
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 80,11%.
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,20%.
6. Tingkat Inflasi sebesar 3,13%.
7. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB/ADHB) sebesar Rp83.604.887,60.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan *non* pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kota Balikpapan

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun (%)
1	Kota Balikpapan (%)	2,64	2,42	(0,22)
2	Kota Balikpapan (Ribu Orang)	17.008 juta	15.780 juta	(1.288 juta)
3	Provinsi Kalimantan Timur (%)	6,03	5,94	(0,09)
4	Nasional (%)	13,10	12,60	(0,50)
5	Peringkat Provinsi	10	10	-
6	Peringkat Nasional	6	6	-

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan

Tingkat kemiskinan Kota Balikpapan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir selalu berada di bawah tingkat kemiskinan provinsi dan nasional serta menjadi kabupaten/kota yang tingkat kemiskinannya terendah di Provinsi Kalimantan Timur. Tingkat kemiskinan yang sudah rendah kemudian masih dapat dikendalikan lagi bahkan hingga menurun menjadi 2,42% ini merupakan hasil dari berjalannya program kerja penanggulangan kemiskinan di masing-masing OPD yang tergabung dalam Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) seperti: Program *Online* Informasi Penduduk Miskin, Program Bantuan Modal Usaha Ekonomi Kecil dan Rumah Tangga, dan Bantuan dari Program Nasional Perlindungan Sosial yang Diterima Penduduk Miskin Kota Balikpapan. Jenis Program Perlindungan Sosial Persentase Rumah Tangga yang Menerima Raskin/Rastra/BPNT sebesar 3,85%, Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar 2,65%, Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebesar 5,67%, dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 1,23% dari total rumah tangga di Kota Balikpapan. Program tersebut dapat mengangkat pendapatan masyarakat miskin lebih tinggi dibanding dengan kenaikan garis kemiskinan Kota Balikpapan. Selain itu, dengan stabilisasi, peningkatan perekonomian kota, dan pengendalian inflasi daerah turut mendorong penurunan jumlah penduduk miskin Kota Balikpapan hingga lima tahun terakhir.

Usaha menurunkan angka kemiskinan daerah ke depannya lebih berat karena kondisi penduduk miskin saat ini sudah sangat sedikit/kecil sebesar 2,42% atau dapat dikategorikan bahwa penduduk miskin Kota Balikpapan dapat dikategorikan sangat miskin. Besaran pendapatan penduduk miskin Kota Balikpapan jauh dari garis kemiskinan dan hal ini dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,26 yang menjauh dari angka 0,06. Hal tersebut berarti pendapatan rata-rata penduduk miskin cukup jauh dibanding dengan batas garis kemiskinannya. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mendekati angka 0,06 yang berarti pendapatan rata-rata antar penduduk miskin tidak beda nyata atau kurang lebih saja.

Untuk itu, program pengentasan kemiskinan ke depan lebih mengarah kepada bantuan modal dan pembinaan yang mengarah untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin sesuai dengan kondisi kegiatan perekonomian seperti: bantuan teknis dan modal kerja bagi usaha pertanian berupa pembinaan kepada petani untuk komoditas yang ekonomis dengan panca usaha tani, bagi usaha lainnya seperti industri mikro kecil dengan bantuan teknik dan design produk serta bantuan pinjaman modal. Hal tersebut harus dilakukan secara terintegrasi dari instansi terkait termasuk dengan lembaga keuangan.

Tabel 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Balikpapan

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Balikpapan	0,67	0,26	(0,41)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur	0,85	0,91	0,06
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,71	1,55	(0,16)
4.	Peringkat Provinsi	4	1	(3)
5	Peringkat Nasional	66	7	(59)

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan

Tabel 3 Tingkat Keparahen Kemiskinan Kota Balikpapan

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahen Kemiskinan Kota Balikpapan	0,26	0,06	(0,20)
2	Tingkat Keparahen Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur	0,20	0,21	(0,01)
3	Tingkat Keparahen Kemiskinan Nasional	0,44	0,37	(0,07)
4.	Peringkat Provinsi	5	1	(4)
5	Peringkat Nasional	169	21	(148)

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan namun belum mulai bekerja.

TPT Kota Balikpapan dalam kurun waktu dua tahun terakhir masih berada di atas atau lebih tinggi dari tingkat TPT provinsi dan nasional.

Sesuai dengan data dari BPS Kota Balikpapan, TPT Kota Balikpapan Tahun 2019 sebesar 7,29%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Balikpapan

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	9,52	7,29	(2,23)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	6,91	6,6	(0,31)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,5	5,34	(0,16)
4	Peringkat Provinsi	9	9	-
5	Peringkat Nasional	n/a	n/a	-

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan

TPT Kota Balikpapan Tahun 2019 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 7,29%, sedangkan TPT Kota Balikpapan Tahun 2018 sebesar 9,52% atau lebih rendah 2,23% dibandingkan dengan angka TPT Tahun 2018.

2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini (Gini Ratio) merupakan alat analisa yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan

- b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada BPS Kota Balikpapan realisasi pencapaian Gini *Ratio* Kota Balikpapan Tahun 2018 adalah sebesar 0,32 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini. Pada Tahun 2019, BPS Kota Balikpapan tidak mengeluarkan data terkait Gini *Ratio* dikarenakan kurangnya *sample* penelitian.

Tabel 5 Gini Ratio Kota Balikpapan

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kota Balikpapan	0,32	n/a	-
2	Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	0,34	0,34	-
3	Tingkat Nasional	n/a	n/a	-
3	Peringkat Provinsi	n/a	n/a	-
4	Peringkat Nasional	n/a	n/a	-

Sumber Dokumen: bps.go.id

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

1. rendah (<60);
2. sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
3. tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
4. sangat tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada BPS Kota Balikpapan Realisasi pencapaian IPM Kota Balikpapan Tahun 2019 sebesar 80,11 poin dengan kategori sangat tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun (%)
1	Kota Balikpapan	79,81	80,11	0,30
2	Provinsi Kalimantan Tinur	75,83	76,61	0,78
3	Indonesia/Nasional	71,39	71,92	0,53
4	Peringkat Provinsi	3	2	(1)
5	Peringkat Nasional	n/a	n/a	-

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan

Realisasi pencapaian IPM Kota Balikpapan Tahun 2019 sebesar 80,11 poin, dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar 79,81 poin yang berarti mengalami kenaikan sebesar 0,3 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau/standar hidup berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 74,41 tahun pada Tahun 2019, lebih lama 0,23 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya yang berada pada 74,18 dengan harapan lama sekolah 14,12 tahun. Sementara Standar Hidup PNB per kapita per tahun sebesar Rp14.791,00 atau meningkat Rp234,00 dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM Kota Balikpapan pada saat ini berada pada urutan 2 dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan

No	Uraian	Kota Balikpapan			Provinsi	Nasional
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2019
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	3,84	4,95	4,78	2,67	n/a
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1	5,2	5,2	2,67	n/a
3	Peringkat Provinsi	3	3	n/a	n/a	n/a
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan

Selama kurun waktu Tahun 2017 s.d 2019 perekonomian Kota Balikpapan mengalami peningkatan sebesar 1,11% dari Tahun 2017 s.d 2018 dan mengalami penurunan sebesar 0,17%. Pada periode Tahun 2017 s.d 2018 pertumbuhan perkonomian Kota Balikpapan adalah sebesar 0,10% dan pada kurun waktu Tahun 2018 s.d 2019 data laju pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan belum tersedia di laman resmi BPS Kota Balikpapan. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kota Balikpapan menempati urutan ke-3 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

2.1.6 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi: (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun; (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) sedikit lebih tinggi

dibandingkan inflasi ringan, laju berkisar antara 10%-30% setahun; (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) mencakup hitungan mulai dari 30%-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Inflasi Kota Balikpapan dalam dua tahun terakhir lebih rendah dari pada inflasi provinsi dan nasional. Pencapaian inflasi yang rendah dan stabil disebabkan oleh terkendalinya inflasi bahan makanan sebagai upaya dari TPID Kota Balikpapan dan Satgas Pangan dalam program pengendalian inflasi daerah.

Sesuai dengan data pada BPS, tingkat inflasi Kota Balikpapan Tahun 2019 sebesar 1,88% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8 Tingkat Inflasi Kota Balikpapan

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kota Balikpapan (%)	3,13	1,88	(1,25)
2	Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Timur (%)	3,24	1,66	(1,58)
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	3,13	2,72	(0,41)
4	Peringkat Provinsi	n/a	n/a	n/a
5	Peringkat Nasional	n/a	n/a	n/a

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan

2.1.7 Struktur Perekonomian Kota Balikpapan

Struktur perekonomian Kota Balikpapan dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 9 PDRB Seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

No	Uraian	(Dalam jutaan rupiah)		
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	693.061,50	746.262,50	782.014,60
2	Pertambangan dan Penggalan	35.262,90	35.529,90	35.935,20
3	Industri Pengolahan	43.657.280,80	45.442.815,10	47.472.116,80
4	Pengadaan Listrik dan Gas	66.169,70	69.496,30	76.027,20
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah; Limbah dan Daur Ulang	54.639,50	55.725,60	58.994,40
6	Konstruksi	8.943.483,40	9.510.131,50	10.176.792,10
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.155.721,30	6.551.791,70	6.936.740,60
8	Transportasi dan Pergudangan	5.978.044,80	6.283.542,00	6.337.254,20
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.108.885,60	1.240.300,30	1.343.770,80
10	Informasi dan Komunikasi	2.644.528,90	2.780.444,90	3.004.061,30
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.394.776,20	2.517.790,50	2.612.608,20
12	Real Estate	1.321.553,40	1.382.661,70	1.410.669,50
13	Jasa Perusahaan	198.591,40	205.647,70	207.752,30
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	894.679,30	940.397,40	1.000.206,70
15	Jasa Pendidikan	1.008.511,90	1.087.881,80	1.137.683,80
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	385.003,40	409.277,60	431.695,60

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
17	Jasa Lainnya	491.885,00	534.098,90	580.565,50
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	76.032.079,10	79.793.795,40	83.604.887,60
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	n/a	n/a	n/a
20	PDRB Provinsi	165.652,00	174.882,00	n/a
21	PDRB Nasional	51.881,00	55.987,00	n/a
22	Peringkat Provinsi	n/a	n/a	n/a
23	Peringkat Nasional	n/a	n/a	n/a

2.2. Kebijakan keuangan

Kebijakan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan TA 2019 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMMD) 2016 s.d 2021. RPJMD Kota Balikpapan memuat program dan kegiatan yang merupakan hasil kajian yang mendalam tentang visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu "Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman". RPJMD juga disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Balikpapan, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, Renstra Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJP Nasional. Tujuannya untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Implementasi program dan kegiatan tersebut membutuhkan anggaran yang dituangkan dalam APBD Kota Balikpapan setiap tahun.

APBD TA 2019 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 menyatakan bahwa "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat". Selanjutnya disebutkan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, antara lain:

1. pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/ Perubahan APBD; dan
3. semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam Tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Beberapa kebijakan keuangan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Kebijakan pendapatan daerah terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Dana Perimbangan dari pusat masih menjadi tumpuan Pemerintah Kota Balikpapan sebagai sumber utama pendanaan program dan kegiatan pada Tahun 2019 dengan tetap langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan sumber-sumber PAD, maka Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan strategi di antaranya dengan melakukan perluasan pembayaran pajak dan retribusi melalui bank, melakukan penambahan gerai dalam rangka mempermudah pembayaran pajak dan retribusi daerah, menerapkan aplikasi *Payment Online*, melakukan operasi sisir dan pengawasan objek pajak daerah, melakukan *update* data PBB-P2, melakukan pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah, dan melakukan sosialisasi terhadap berbagai kebijakan-kebijakan baru.

Sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2019 diproyeksikan dari pendapatan sebesar Rp2.527.027.291.918,00 dan dari penerimaan pembiayaan berupa penggunaan SiLPA Tahun 2018 sebesar Rp291.635.286.428,00. Penerimaan Pendapatan direncanakan bersumber dari PAD sebesar Rp688.424.448.700,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.835.602.843.218,00 dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp3.000.000.000,00.

2.2.2 Kebijakan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk tetap memprioritaskan dan fokus terhadap belanja daerah yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja Daerah di Tahun 2019 dialokasikan untuk 3 pos pengeluaran yang terdiri dari: Belanja Operasi sebesar Rp1.943.252.515.152,00, Belanja Modal sebesar Rp831.783.646.194,00, dan Belanja Tidak terduga sebesar Rp11.241.417.000,00.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada TA yang bersangkutan maupun TA berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pos Penerimaan Pembiayaan direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA sebelumnya, sedangkan pada Pos Pengeluaran Pembiayaan dimungkinkan adanya alokasi untuk penyertaan modal/Investasi Pemerintah Daerah pada BUMD, PDAM dan pada Bank Pembangunan Daerah.

Penerimaan Pembiayaan pada TA 2019 dialokasikan sebesar Rp291.635.286.428,00 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2018. Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp29.225.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Balikpapan.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD yang merupakan gambaran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan secara keseluruhan dijelaskan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Balikpapan TA 2019.